

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
MENGATASI KEMISKINAN**

**TESIS**

**OLEH:**

**ELVAWATI  
0821218006**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

# STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK MENGATASI KEMISKINAN

Oleh: ELVAWATI

08 21218 006

(Di bawah bimbingan Prof. Dr. Afrizal, MA dan Dr. Asmawi, MS)

## RINGKASAN

Kemiskinan merupakan masalah yang sudah mendunia, salah satu masalah yang dihadapi Indonesia pada saat sekarang adalah masalah tingginya angka kemiskinan yaitu 325.300 juta jiwa dari total penduduk Indonesia 230 juta jiwa pada tahun 2008, sedangkan Sumatera Barat angka penduduk miskinnya juga tinggi yaitu pada tahun 2009 sebesar 313,5 jiwa dari 12 (dua belas) kabupaten yang ada dan 429,3 jiwa di kotanya dengan jumlah total penduduk Sumatera Barat secara keseluruhan adalah 4.523.125 jiwa. Dilihat dari 12 kabupaten yang ada di Sumatera Barat, Kabupaten Solok merupakan Kabupaten peringkat ketiga yang angka kemiskinannya tinggi dilihat dari jumlah rumah tangga miskin yaitu sebesar 23797 Rumah Tangga Miskin, dalam waktu tiga tahun kemiskinan di Kabupaten Solok ini mengalami penurunan sebesar 1336 RTS. Oleh sebab itu penelitian ini mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh pemerintah kabupaten untuk menurunkan angka kemiskinan dan memahami penyebab pemerintah memilih strategi yang diterapkannya.

Penelitian ini menggunakan teori Interaksionisme Simbolik, Dengan teori ini strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Solok di pandang sebagai tindakan sosial yang bermakna. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pemilihan informan purposive sampling (secara sengaja).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sekarang adalah negara yang sedang bangkit untuk mulai membangun kembali dari ketepurukan ekonomi pasca runtuhnya Orde Baru. Ketepurukan tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan di Indonesia dengan tingkat kesejahteraan yang sangat jauh dari harapan yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kelaparan, tingginya angka pengangguran, banyaknya anak-anak yang putus sekolah yang disebabkan oleh krisis yang melanda Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru yaitu sebesar 25.9 juta jiwa, dimana pada tahun 1996 atau sebelum jatuhnya Orde Baru penduduk miskin Indonesia hanya berjumlah 22.5 juta jiwa ditahun 2002 menjadi 48.4 juta jiwa (Mafruhah, 2005).

Baik pada masa Orde Baru maupun pada pada Era Reformasi saat ini, pembangunan sosial hanya sebagai batas jargon yang belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Penanganan masalah sosial masih belum menyentuh persoalan mendasar. Pada hal cita-cita kemerdekaan adalah pembangunan baik bidang ekonomi maupun bidang sosial, budaya, politik dan lain-lain yang dituangkan pada pasal 33 UUD 1945 yang berjudul kesejahteraan sosial (Suharto, 2005:55).

Menurut Midgley 2005, kondisi kesejahteraan sosial dewasa ini setelah Reformasi diwarnai oleh tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran, angka putus sekolah,

serta meningkatnya jumlah anak kekurangan gizi. Ini menunjukan bahwa belum adanya kemajuan berarti dalam bidang kesejateraan sosial semenjak reformasi terjadi.

Oleh sebab itu, pembangunan sesungguhnya harus menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bahkan hakekatnya pembangunan adalah perubahan itu sendiri. Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu antara pembangunan dan kebijakan sosial adalah dua konsep yang saling terkait sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia karena pembangunan adalah konteks kebijakan beroperasi, sementara itu kebijakan memujuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam berbagai program. Pembangunan juga harus diartikan sebagai proses memajukan dan memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan. Pembangunan sosial itu adalah sebuah strategi pembangunan yang pro kerakyatan anti kemiskinan dan anti kesenjangan. Hal ini ditegaskan oleh Hardiman dan Midgley (1995) dalam Suharto 2005 "Model pembangunan sosial menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, yakni peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan".

Menurut Edi Suharto (2005) tujuan pembangunan tersebut dicapai dengan dua cara. Pertama menumbuh kembangkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja. Kedua menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan serta pelayanan yang memungkinkan mereka mendapatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Solok memiliki strategi untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Solok. Pertama adalah strategi aset, yaitu dengan cara memberikan aset kepada orang miskin. Strategi ini di terapkan berdasarkan pemaknaan pemerintah kabupaten terhadap penyebab kemiskinan yang melandawarganya, dimana pemerintah Kabupaten Solok memaknai kemiskinan yang terjadi dikabupatennya akibat kurangnya aset yang dimiliki oleh masyarakat baik aset nyata maupun aset tidak nyata. Oleh sebab itu bantuan aset yang diberikan berupa keterampilan dengan bentuk program pelatihan keterampilan kelompok perempuan/P2WKSS. Keterampilan yang diberikan adalah keterampilan dalam pembuatan dan pengelolaan rendang dan pengemasannya, pelatihan keterampilan dalam pengelolaan sayur sehingga bisa dipasarkan diluar daerah dan pembuatan pupuk kompos dari kotoran ternak. Alasan pemerintah menerapkan program ini adalah dikarenakan perempuan didaerah tertinggal berada dalam keterasingan, dan keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang lebih baik. Sehingga mereka sulit untuk bisa keluar dari kemiskinan yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mereka. Oleh sebab itu pemerintah daerah memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok perempuan didaerah tertinggal agar kelompok perempuan didaerah tertinggal tersebut dapat berkembang dan maju.

Kedua adalah strategi pengembangan keuangan mikro. Pemerintah kabupaten menerapkan strategi ini karena kemiskinan yang terjadi Kabupaten Solok salah satu di makanai oleh pemerintah karena keterbatasan modal. Akibat modal yang kecil seseorang dapat berada

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2005. Pengantar Metode Kualitatif. Laboratorium Sosiologi Fisip Unand. Padang.
- \_\_\_\_\_. 2008. Pengantar Metode Kualitatif. Laboratorium Sosiologi Fisip Unand. Padang.
- \_\_\_\_\_. 2006. Pemetaan Kemiskinan Dan Strategi Pengentasannya Berbasis Institusi Loka! Dan Berkelanjutan Di Era Otonomi Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- \_\_\_\_\_. 2006. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Institusi Lokal. Kantor PR IV UGM.
- Berger, L. Peter. 1985. Sosiologi Ditafsirkan Kembali Esei Tentang Metode Dan Bidang Kerja. Jakarta: LP3ES.
- Badan Pusat Statistik. 2008. Analisis dan Pengetahuan Tingkat Kemiskinan. Jakarta: CV Nario Sari.
- \_\_\_\_\_. 2009. Kabupaten Solok Dalam Angka ( Solok Regency In Figures 2008/2009). Solok. Sumatera Barat.
- \_\_\_\_\_. 2008. Pendataan Program Perlindungan Sosial. Sumatera Barat.
- Maffruhah, Izza. 2009. Multidimensi Kemiskinan. Surakarta Jawa Tengah. LPP UNS.
- Maleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Midgley, James. 2005. Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.
- M, Poloma. 1984. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: CV Rajawali.
- Narbuko dan Achamadi. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara.